

SISTEMATIKA

	Halaman
I. Latar Belakang	
1. Kondisi Umum	1
2. Identifikasi Masalah	12
II. Tujuan dan Sasaran	
3. Visi dan Misi Polda sulsel.....	13
4. Tujuan Jangka Menengah	15
5. Sasaran Tahun 2020	16
6. Sasaran Prioritas Tahun 2020.....	17
III. Arah Kebijakan Prioritas Tahun 2020	
7. Arah Kebijakan Strategis Polda Sulsel.....	19
8. Arah Kebijakan Strategi Kapolrestabes.....	27
IV. Program Kegiatan dan usulan pagu Indikatif TA 2020	
9. Program, Kegiatan dan Sasaran Polrestabes Mksr Tahun 2020	35
10. Rencana anggaran Polrestabes Makassar T.A 2020.....	41
V. Penutup	

**RENCANA KERJA (RENJA)
POLRESTABES MAKASSAR
TAHUN 2020**

I

LATAR BELAKANG

I. LATAR BELAKANG

1. Kondisi umum

Situasi Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia baik sebagai individu maupun selaku bagian dari kelompok dalam kehidupan masyarakat umum, maka Polri yang merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat yang ditandai dengan terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum serta bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Pada umumnya kondisi kamtibmas di wilayah hukum Polrestabes Makassar sampai saat ini relatif kondusif, walaupun masih ada beberapa penanganan masalah keamanan yang belum sesuai harapan masyarakat seperti potensi anarkhisme serta tindak kekerasan masih dapat terjadi secara turbelensi dengan tidak mengenal waktu dan tempat, demikian juga dengan masih terjadinya berbagai jenis kejahatan dan bencana alam serta yang menjadi pokok perhatian Polri dalam penanganan permasalahan situasi kamtibmas tahun 2020.

Kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat sebagaimana tersebut diatas dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti perkembangan aspek kehidupan bermasyarakat dan pengaruh lingkungan internal maupun eksternal terhadap pelaksanaan tugas serta pengaruh global lainnya yang tidak dapat dihindari yang dapat mempengaruhi situasi keamanan dan sosial masyarakat lainnya.

a) Perkembangan.....

a. Perkembangan Aspek Kehidupan Nasional / Daerah.

- 1) Dinamika masyarakat Indonesia tidak terlepas dari pengaruh globalisasi serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang mendukung terjadinya perubahan baik langsung maupun tidak langsung terhadap berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dampak dinamika tersebut selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga menimbulkan berbagai bentuk ancaman dan gangguan seperti kejahatan konvensional dimensi baru, kejahatan trans nasional, kejahatan terhadap kekayaan Negara serta kejahatan yang berimplikasi kontijensi.
- 2) Makassar merupakan kota metropolitan dengan tingkat aktifitas masyarakat yang cukup tinggi dan kultur yang berbeda – beda timbulkan problema dan pemicu timbulnya gejolak sosial. Di samping itu, adanya kebijaksanaan – kebijaksanaan pemerintah yang membias pada reaksi kelompok – kelompok masyarakat tertentu yang berdampak pada stabilitas kamtibmas.
- 3) Polri sebagai institusi Negara yang bertugas memelihara keamanan dalam negeri, penegakan hukum, memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman terhadap masyarakat harus dapat mengantisipasi berbagai bentuk ancaman sebagai dampak perkembangan lingkungan strategis terutama berkaitan dengan kebijakan pemerintah dengan agenda utama meliputi Peace, Democracy, dan Prospersty dalam mewujudkan Indonesia yang lebih aman, damai, adil, demokrasi dan sejahtera.
- 4) Bila mengkaji berbagai permasalahan yang menjadi Potensi Gangguan (PG) dan penambahan jumlah kendaraan yang tidak seimbang dengan sarana jalan dan lain-lain yang keseluruhannya dapat berpengaruh terhadap Ambang Gangguan (AG) dan Gangguan Nyata (GN).

b. Perkembangan Wilayah Polrestabes Makassar.

1) Aspek Politik

- (a) Untuk tahun 2020 kita akan memasuki tahun politik pemilihan walikota makassar, hal ini tentunya dari masing-masing kandidat berusaha dengan berbagai cara untuk mendapatkan simpati masyarakat calon pemilih.
- (b) Kerawanan dibidang Politik juga berkisar pada politik praktis kelompok masyarakat kampus, organisasi, LSM
(b) dalam.....

dalam menanggapi setiap kebijakan pemerintah pusat maupun daerah.

- (c) Upaya untuk mendapatkan dukungan yang dilakukan oleh tim sukses atau relawan terhadap masyarakat pemilih dilakukan dengan berbagai cara termasuk money politik sehingga hal ini menimbulkan persaingan yang nilai tidak memberikan pendidikan politik yang baik terhadap masyarakat.
- (d) Tahun 2020 unjuk rasa yang akan dilakukan masyarakat, kampus cenderung akan mengalami peningkatan ini dikaitkan dengan beberapa aspek antara lain :
 - (a) Adanya kebijakan pemerintah yang tidak populer seperti kenaikan TDL.
 - (b) Pengurangan subsidi BBM.
 - (c) Maraknya pekerja asing

2) Aspek Ekonomi

- (a) Bahwa perkembangan situasi perekonomian di wilayah Polrestabes Makassar selama 2020 dalam keadaan normal walaupun beberapa permasalahan muncul dipermukaan berkaitan dengan kebijaksanaan pemerintah seperti pengalihan minyak tanah ke Gas Elpiji, PHK oleh beberapa perusahaan, dan permasalahan gaji baik UMP maupun UMR.
- (b) Jika dilihat dari permasalahan dibidang ekonomi yang menimbulkan aksi maupun kecenderungan timbul keresahan kelompok-kelompok masyarakat tertentu sebagai berikut :
 - (a) Kasus tanah.
 - (b) PHK oleh perusahaan terhadap karyawan
 - (c) Kasus tenaga kerja
 - (d) Kenaikan harga Sembako
 - (e) Dan lain-lain
- (c) Disamping permasalahan sebagaimana digambarkan diatas yang dominan pada aspek ini cenderung terjadi rusuh adalah penertiban pedagang Kaki lima, sebab kelompok ini memiliki tingkat perekonomian dan pendidikan terbatas sehingga apabila ditertibkan yang terjadi adalah perlawanan.
- (d) Permasalah di bidang Ekonomi untuk tahun 2020 adalah banyaknya usaha mini market (Alfa mart, Alfa Midi, Indo Maret, Alfa Expres) yang kegiatannya dapat mengurangi / mempengaruhi pendapatan pedagang kaki lima (Pedagang eceran), jika hal ini tidak dilakukan antisipasi dan.....

dan koordinasi kemungkinan para pedagang kaki lima (Eceran) akan terancam tutup dagangannya karena tidak mampu bersaing yang dapat dimanfaatkan oleh oknum / kelompok tertentu untuk melakukan pengarahannya dengan merusak bahkan membakar usaha mini market tersebut.

- (e) Hadirnya transportasi berbasis on line di Kota Makassar masih menjadi pro dan kontra karena sampai saat ini masih terdapat protes dari pengemudi transportasi konvensional karena dianggap belum memiliki payung hukum yang jelas namun disisi lain kehadiran transportasi on line disambut baik oleh masyarakat karena selain lebih efektif, nyaman, serta tarif yang dikenakan juga lebih murah dibandingkan transportasi konvensional
- (f) Permasalahan di bidang Ekonomi untuk tahun 2020 adalah banyaknya usaha mini market (Alfa mart, Alfa Midi, Indo Maret, Alfa Expres) yang kegiatannya dapat mengurangi / mempengaruhi pendapatan pedagang kaki lima (Pedagang eceran), jika hal ini tidak dilakukan antisipasi dan koordinasi kemungkinan para pedagang kaki lima (Eceran) akan terancam tutup dagangannya karena tidak mampu bersaing yang dapat dimanfaatkan oleh oknum / kelompok tertentu untuk melakukan pengarahannya dengan merusak bahkan membakar usaha mini market tersebut.
- (g) Masalah Tenaga Kerja
- (h) Kemarau yang berkepanjangan
- (i) Luas lahan yang semakin menyempit
- (j) Sering adanya pemboman ikan
- (k) Adanya usaha-usaha dari pihak tertentu yang mengambil batu karang.
- (l) Pengrusakan biota laut
- (m) Memakai pukat harimau untuk menangkap ikan

Permasalahan aspek ekonomi yang dapat terjadi adalah perbedaan Kemampuan daya saing dan dampak dari adanya penyelundupan garmen, beras, gula pasir, pupuk, kenaikan harga minyak tanah.

3) Aspek Budaya

- a) Adanya Undang-Undang “Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum” dan transparansi (keterbukaan) maka Mahasiswa dari beberapa Perguruan Tinggi di Makassar dalam melakukan aksi Unras bukan saja menyikapi kebijaksanaan Pemerintah Daerah/Pusat ataupun kasus-kasus tertentu tetapi kebijaksanaan pihak rektorat pun disoroti dan melakukan kegiatan aksi yang tidak jarang.
- b) berujung pada tindakan kekerasan bahkan pengrusakan terhadap fasilitas kampus meliputi gedung dan lain-lain hal ini untuk tahun 2020 kemungkinan tetap akan terjadi jika dikaitkan dengan beberapa indikator antara lain adanya oknum/kelompok organisasi tertentu yang memiliki cenderung radikal berada di kampus, perbedaan pemahaman antara oknum tertentu (fakultas) disamping itu ada perasaan ego yang ingin dianggap superior dikampusnya.
- c) Perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi komunikasi dan transportasi serta informasi turut menyebarkan pengaruh barat ke seluruh belahan dunia, elektronika telah memasukan budaya kehidupan bebas melalui internet dan dimakassar telah dibangun warnet dan jaringan operasional tidak menentu dan memiliki kerawanan terutama kasus criminal seperti pencurian ranmor, pencurian Laptop, penodongan dan bahkan tindakan asusila.
- d) Jika dilihat aksi unjuk rasa khususnya dari masyarakat kampus terdapat 5 (lima) PTN / PTS yang dominan yaitu UMI, UNISMUH, UNM, UIN, dan Univ 45 disamping itu memiliki kecenderungan ada oknum-oknum tertentu yang memiliki watak yang menampilkan sikap emosional pada saat aksi sehingga mudah terprovokasi untuk melakukan aksi yang menjurus anarkhis dengan demikian maka untuk tahun 2020 hal serupa kemungkinan akan terjadi bahkan akan mengalami peningkatan dikaitkan dengan masuknya pemilihan legislative dan presiden RI
- e) Data aksi unjuk rasa dari kalangan mahasiswa PTN / PTS di Makassar Periode Januari s/d Desember 2017 berjumlah 1.175 yang berujung bentrok dan bertindak anarkis berjumlah 3 kali, dari data tersebut dapat dilihat bahwa kuantitas unjukrasa di kota Makassar meningkat namun dapat dikelola dengan baik sehingga meminimalisir terjadinya bentrok anarkis

Permasalahan aspek Sosial Budaya yang dapat terjadi adalah adanya dampak globalisasi seperti pergaulan bebas dan narkoba, kesenjangan sosial dan bertambahnya pengangguran akibat kurangnya lapangan pekerjaan.

4) Aspek Agama

- (a) Toleransi kehidupan antar Umat beragama di Wilayah Polrestabes Makassar dirasakan cukup baik dan berjalan normal walaupun ada permasalahan-permasalahan akibat kurangnya kesadaran, pengertian serta pengaruh dari timbulnya konflik yang berskala Internasional seperti konflik di Palestina , Iraq dan Suriah yang dapat berdampak terhadap kerukunan umat beragama di kota Makassar
- (b) Dari perbedaan kepercayaan (Agama) tetapi dilihat dari kehidupan sehari-hari kehidupan antara umat Bergama di Wilayah Polrestabes Makassar dirasakan cukup baik dan berjalan normal walaupun ada permasalahan-permasalahan akibat dari pengaruh berita Hoax terkait penyerangan ulama oleh orang yang disinyalir sebagai anggota PKI beredar di Media Sosial serta masih adanya sebahagian orang yang membedakan antara Pribumi dan non pribumi (keturunan China) sehingga jika terjadi perlakuan seseorang terbawa pada kelompok.
- (c) Masalah yang perlu diwaspadai adanya kegiatan ajaran / faham aliran yang menyimpang ajaran Agama seperti Nassabandiyah, Al-Qiyadah Al- Islam, Ahmadiyah, An Natsir
- (d) Adanya rumah tinggal yang digunakan tempat ibadah dan pembangunan rumah ibadah tanpa melalui prosedur (Ijin dari Pemerintah).
- (e) Masalah yang perlu diwaspadai adanya kegiatan ajaran / faham aliran yang menyimpang ajaran Agama seperti ISIS dan SYIAH yang akhir - kahir ini meresahkan masyarakat

5) Aspek Hankam

- (a) Aksi terror bom di Makassar dimungkinkan masih akan terjadi di tahun-tahun mendatang walaupun beberapa pelaku telah tertangkap namun kelompok tersebut maupun jaringan masih ada terutama di wilayah Makassar ini di kaitkan dengan beberapa aksi terror dan penangkapan pelaku di Makassar yang terinspirasi dengan aksi – aksi terror di luar negeri

(b) Kemudahan.....

- (b) Kemudahan mengakses informasi di media sosial dapat dijadikan sarana bagi kelompok – kelompok radikal untuk menyebarkan ideologinya serta melakukan perekrutan anggota baru serta penyebaran tehnik – tehnik untuk melakukan aksi – aksi terorisme
- (c) Makassar merupakan kota besar yang didiami oleh berbagai suku, agama dan adat istiadat yang memiliki kecenderungan terjadinya kesalah pahaman seseorang yang berdampak pada permasalahan berpotensi kontijensi seperti SARA, rusuh massal, terror / peledakan bom, penjarahan pengrusakan dan pembakaran
- (d) Kelompok eka dalam mewujudkan aspirasinya yang menginginkan Negara Islam di Indonesia khususnya sulawesi selatan hal ini tercermin dalam kegiatan kelompok Islam radikal lewat perjuangan Syariat Islam memaksakan kehendak yang sampai sekarang belum terpenuhi.
- (e) Strategi Perjuangan Eka didalam mencapai tujuannya akan terus-menerus melakukan penyusunan kekuatan dan pembinaan melalui rapat – rapat pengajian dan memanfaatkan kesempatan dengan penyebaran selebaran, issue serta kegiatan Oknum oknum tertentu untuk mempengaruhi orang lain.
- (f) Kelompok Ekstrim lain masih ada di Wilayah Polwitabes Mks meski jumlahnya oknum kecil namun potensial untuk mengembangkan karena kelompok ini pada umumnya orang-orang terpelajar yang sudah dipengaruhi faham lain diluar Pancasila.
- (g) Memperhatikan beberapa kasus yang terjadi terkait dengan perkelahian antar mahasiswa di perkirakan terdapat keterlibatan oknum atau kelompok di luar dari mahasiswa walaupun secara hukum sulit di buktikan
- (h) Pelanggaran kejahatan Orang Asing Kunjungan orang asing dari manca Negara dalam rangka kunjungan kerja, kunjungan usaha maupun kunjungan wisata di wilayah Makassar akan mengalami peningkatan sehingga perlu ditingkatkan kewaspadaan untuk tidak menimbulkan permasalahan yang signifikan seperti pemalsuan / penyalagunaan dokumen, pelanggaran izin kerja, izin penelitian dan imigran gelap.
- (i) Makin banyaknya imigran yang memasuki wilayah Makassar dapat menimbulkan kerawanan diantaranya konflik antara sesama imigran, konflik antara imigran dan warga lokal serta mudahnya kelompok – kelompok radikal

menyusup

menyusup kedalam kelompok imigran untuk masuk ke wilayah Makassar

Permasalahan aspek hankam yang dapat terjadi adalah konflik horizontal dan separatisme, terorisme, pemasokan narkoba dari luar negeri masuk Ke Makassar

6) Kerawanan Kamtibmas.

(a) Situasi dan kondisi lingkungan yang diperkirakan dapat memberikan peluang terjadinya gangguan kamtibmas pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- Lingkungan Pemukiman
- Hotel / Penginapan
- Tempat Hiburan / Pusat Perbelanjaan
- Pusat – pusat Pemerintahan
- SPBU dan Kantor Pertamina
- Tempat keramaian Umum
- Jalanan Umum

(b) Berdasarkan data Kuantitas dan jenis kejahatan maka jenis kejahatan yang diperkirakan akan terjadi pada periode tahun 2020 antara lain :

- | | |
|----------------------|-------------------|
| - Curat | - Pemerasan |
| - Curas | - Perkosaan |
| - Curanmor | - Perjudian |
| - Anirat | - Penipuan |
| - Aniaya Ringan | - Penggelapan |
| - Pembunuhan | - Pengrusakan |
| - Uang Palsu | - Laka Lantas |
| - Kemacetan | - Narkoba |
| - terorisme | - Illegal logging |
| - Perkelahian klmpok | - Bencana alam |
| - Korupsi | - Rusuh Massal |
| - Pelanggaran | - trafficking |

b. Analisis SWOT

Beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas Polri dalam rangka melaksanakan fungsi keamanan tersebut dapat dianalisa dari faktor-faktor baik dari lingkungan intern maupun ekstern melalui analisa SWOT, yaitu :

1) Kekuatan (strengths)

a). Personil Polrestabes Makassar sebanyak 2.238 orang, yang terdiri dari 35 orang Pamen, 279 orang Pama, 1.866 orang Bintara.

- b). PNS Polrestabes sebanyak 59 orang, terdiri dari Gol I dan II sebanyak 39 orang, Gol III sebanyak 20 orang,
- c). Postur kekuatan Polri telah terstruktur dan tergelar sesuai dengan pola kebutuhan dan keseimbangan organisasi dengan kompetensi utama “ Profesional, Bermoral dan Modern (PBM) “.

Hal ini sinkron dengan tataran Polrestabes sebagai Kesatuan operasional dasar dan Polsek sebagai garda terdepan operasional kepolisian.

- d). Sarana operasinonal Polrestabes Makassar dan peralatan berbagai jenis yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional Polrestabes Makassar telah dilengkapi dengan kendaraan R2, R4, R6 walaupun sarana dan prasarana tersebut belum tercukupi secara maksimal.

2) Kelemahan (Weaknes)

- Kualitas Pers masih dirasakan belum memadai terutama SDM Polri saat ini yang bertugas dilapangan dibanding dengan berbagai macam tingkat intelektual masyarakat yang dihadapi, masih belum sesuai dengan harapan masyarakat.
- Dukungan anggaran bila dibandingkan dengan tugas opsional dilapangan masih terbatas sehingga masih sering muncul dalam masyarakat bahwa pelayanan Polri masih dirasakan terlambat atau sebaliknya melayani masyarakat dengan mengharapakan pamrih.
- Masih belum mampu terdukung sepenuhnya peralatan khusus (alsus) untuk beberapa penugasan khusus oleh satuan-satuan operasional.
- Belum optimal peran serta masyarakat dalam kepatuhan hukum dan partisipasi terhadap tugas Polri/upaya mewujudkan perpolisian masyarakat.
- belum optimal hubungan lintas sektoral dengan instansi terkait.

3). Peluang (Oportunity)

- Dengan Undang - Undang tahun 2002 akan memberikan kapasitas Polri dalam melaksanakan tugas sebagai pelindung, Pengayom, dan Pelayan masyarakat serta sebagai penegak Hukum.

Pemisahan.....

- Pemisahan polri dengan TNI, Polri semakin percaya diri dalam pelaksanaan tugas dan berkurang tindakan intervensi dan Partisipasi masyarakat semakin positif terutama dalam pengawasan kinerja Polri melalui LSM dan anggota DPRD Kota Makassar.
- Reformasi Polri yang berkelanjutan terus dilakukan secara bertahap, konsisten dan sesuai dengan komitmen reformasi nasional yang terus bergulir. Hal ini semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri.
- Perkembangan otonomi daerah dan sistem desentralisasi dengan mendekatkan pelayanan Pemerintah daerah kepada masyarakat, pemekaran wilayah dalam angka tuntutan kemandirian daerah, disatu sisi memicu peningkatan kesejahteraan masyarakat namun disisi lain desentralisasi dan pengembangan wilayah yang tidak diimbangi kemandirian dan kekuatan ekonomi akan membawa dampak meningkatnya dan meluasnya daerah miskin. Makin kritisnya masyarakat terhadap akuntabilitas dari sistem politik dan pemerintahan daerah serta peran kunci institusi-institusi publik dan sosial di daerah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah. Mengimbangi kebijakan tersebut maka Polri khususnya Wilkum Polrestabes Makassar harus segera mewujudkan Postur Polri sebagaimana diharapkan yaitu Mabes Polri kecil, Polda yang ramping, Polres yang besar, dan Polsek yang Kuat. Harapannya dengan Postur polri sebagaimana diharapkan akan mampu memberikan kontribusi dalam rangka menunjang kemandirian daerah.
- Pematapan institusi sipil yang banyak dipelajari masyarakat berdampak positif pada pengembangan lembaga Polri yang berorientasi sipil, dalam arti polri yang bertanggungjawab melindungi kehidupan, orang dan harta benda warga masyarakat serta keamanan dan ketertiban masyarakat melalui penegakan hukum yang adil, menghormati HAM dan berbasis penyidikan ilmiah serta mempererat interaksi dengan semua potensi masyarakat untuk menjalankan fungsi-fungsi Kepolisian.

4). Ancaman (Threats)

- Kondisi geografi Indonesia yang terdiri dari kepulauan dan perairan yang luas, dengan penyebaran penduduk yang tidak merata dan sumber alam yang berlimpah, telah menciptakan kerawanan keamanan yang multi dimensi, terutama di perairan, pertambangan dan kehutanan apabila tidak dibarengi penertiban internal instansi terkait dapat menciptakan pemerintahan yang tidak bersih.

- Gangguan nyata (GN) keamanan yang diakibatkan tidak teratasinya Potensi gangguan (PG) dan Ambang gangguan (AG)

tersebut dapat menyulut tindakan kejahatan ditengah kehidupan masyarakat antara lain : perampokan, pencurian, kecelakaan lalu lintas, ketidaktertiban masyarakat, serta konflik dengan rekayasa provokator , yang termaktub dalam 4(empat) golongan kejahatan Yaitu : Pertama, kejahatan konvensional yang hampir merata di seluruh negeri dan sangat dirasakan langsung oleh masyarakat. Kedua, kejahatan transnasional termasuk terorisme yang menimbulkan dampak politis dan psikologis yang mencekam, begitu pula dengan penyalahgunaan narkoba,psikotropika dan zat aditif lainnya (napza) yang telah menimbulkan korban jutaan orang,pencucian uang (money laundry) oleh para koruptor, kejahatan dunia maya (cyber crime) dan penyelundupan yang sangat mengganggu ekonomi negara. Ketiga, kejahatan terhadap kekayaan negara meliputi : Korupsi, pembalakan liar, Pencurian ikan oleh nelayan asing (Illegal fishing), Penyelundupan, penambangan liar (Illegal mining), perdagangan orang (human trafficking), dan perdagangan ilegal lainnya. Keempat, kejahatan yang berimplikasi kontijensi, yang berdampak pada gangguan keamanan yang meluas sehingga memerlukan pengerahan kekuatan besar untuk menanggulanginya.

- Sumber daya manusia yang tersedia di masyarakat yang merupakan calon – calon personil Polri, masih memiliki paradigma bahwa Polisi adalah penguasa yang bisa menuntut dan meminta sesuatu pada masyarakat, bukan sebagai pelayan masyarakat yang dituntut banyak memberi. Apalagi sistem rekrutmen yang masih belum sepenuhnya dapat dilaksanakan tanpa interest-interest tertentu dan sistem pendidikan yang belum mampu merubah paradigma tersebut yang akan membawa konsekuensi sifat dan sikap manusia Polri seperti apa yang ada saat ini.
- Fluktuasi harga kebutuhan bahan pokok akan berdampak kepada Masyarakat terutama tindak kriminalitas dalam berbagai bentuk .
- Adanya tuntutan masyarakat terhadap penegakan hukum secara manusiawi, adil dan menghormati HAM akan menimbulkan keragu – ragan Polri bertindak dilapangan.
- Sistem hukum dan peradilan yang tumpang tindih mengakibatkan keracuan dalam operasionalisasi penegakan hukum dilapangan, terutama menyangkut

penegakan.....

masalah kewenangan institusi mana yang berkompeten untuk menangani.

- Berfluktuasinya harga BBM akan berdampak kepada masyarakat terutama tindak kriminalitas baik dalam bentuk demonstrasi, pembakaran, pengrusakan dan tindak anarkhisme lainnya.
- Sistem politik masih diwarnai oleh pengutamaan penguasaan posisi – posisi kekuatan politik untuk memperoleh akses pada kekayaan negara dan pengaruh pada dunia usaha, dan kekuasaan dalam birokrasi pemerintahan, yang dimungkinkan karena mendorong akumulasi perundang – undangan baru yang ternyata berakibat melemahkan penegakan hukum dan meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat pada sistem kekuatan bangsa.

2. Identifikasi Masalah

- a) Beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja Polri antara lain :
- 1). Keterbatasan Personil khususnya yang bertugas sebagai pengembang fungsi Intel, Reserse, Lantas sangat berpengaruh dalam pencapaian hasil yang diinginkan.
 - 2). Jaringan Informasi yang masih kurang sehingga sulit untuk upaya mengungkap suatu kasus terjadi.
 - 3). Masih lemahnya SDM/ Skill yang dimiliki Personil diberbagai bidang IPTEK sehingga berpengaruh dalam penciptaan kondisi dan pelayanan masyarakat yang maksimal.
 - 4). Perlunya mencukupi kebutuhan anggaran baik itu bidang SDM maupun kebutuhan anggaran biaya lidik sidik minimal mendekati kebutuhan ideal.
 - 5). Belum tercapainya Ratio polisi yang ideal.
- b) Karakteristik sebagian masyarakat khususnya suku bugis dan makassar yang cenderung temperamen tinggi / emosional dan kebiasaan membawa sajam serta meminum – minuman keras membawa warna tersendiri terkait dengan gangguan kamtibmas yang terjadi terutama penganiayaan dan pembunuhan.

II.....

II

TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Polri dalam pemerintahan tersebut di atas dengan dipengaruhi aspek perkembangan kehidupan nasional dan faktor lingkungan baik internal maupun eksternal, maka telah ditetapkan visi, misi, tujuan sasaran, strategi dan kebijakan pada tahun 2020 sebagai berikut :

3. VISI DAN MISI**a) VISI DAN MISI POLDA SULSEL****1) Visi Polda Sulsel**

“Terwujudnya postur Polda Sulsel yang unggul dalam pelayanan prima kepada masyarakat, yang berorientasi pada kearifan lokal: Sipakatau (saling memanusiaikan), Sipakalebbi (saling memuliakan/menghargai) dan Sipakainge (saling mengingatkan/demokrasi), guna mendukung terciptanya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan kegotong royongan dalam rangka memantapkan Kamtibmas Provinsi Sulawesi Selatan”.

2) Misi

- (1) mewujudkan pemuliaan pelayanan kamtibmas prima untuk meningkatkan kepercayaan publik melalui 9 (Sembilan) program unggulan yaitu kami datang melayani anda, Makasar beretika, Polisi mabbulo sibatang, penanganan konflik sosial, police care, police goes to school, kampung kamtibmas, pencegahan tipikor dan rekrutment calon polisi (Betah) dan program M4KS;.
- (2) mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya yang dimiliki guna mendukung kegiatan operasional Polda Sulsel terutama dalam mengamankan sumberdaya maritim;
- (3) membangun jaringan intelijen yang handal, yang mampu melaksanakan deteksi dini dan deteksi aksi secara cepat dan akurat setiap gejolak sosial yang timbul dalam masyarakat;

(4) Melakukan.....

- (4) melakukan penegakan hukum secara transparan, tidak diskriminatif, menjunjung tinggi supremasi hukum, HAM, bebas korupsi, bermatabat dan terpercaya;
- (5) menjamin terlaksananya penanggulangan keamanan dalam negeri di wilayah Prov. Sulawesi Selatan untuk mendukung terciptanya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian; dan
- (6) meningkatkan kemitraan dengan masyarakat dan mempererat Sinergi Polisional Inter Departemen (Sispindep) dengan Instansi terkait berlandaskan kegotong royongan.

b) Visi dan Misi Polrestabes Makassar

Visi dan Misi Polrestabes Makassar adalah terwujudnya postur Polri yang Profesional, Modern, dan Terpercaya yang berorientasi pada kearifan lokal : Sipakatau (saling memanusiaikan) , Sipakalebbi (saling menghargai) dan Sipakainge, (saling mengingatkan) , guna mendukung terciptanya kota Makassar yang berdaulat , mandiri dan berkepribadian berlandaskan ke gotong royongan dalam rangka memantapkan Kamtibmas di wilayah Polrestabes Makassar dan jajarannya.

(1) Pernyataan Visi Polrestabes Makassar .

Polrestabes Makassar bertekad membangun diri menjadi Sentra Pelayanan Masyarakat yang Profesional Modern dan terpercaya, baik dalam penegakan hukum maupun dalam Pelaksanaan pelayanan, pengayom dan pelindung Masyarakat serta menjadikan wilayah Polrestabes Makassar sebagai gerbang Indonesia Timur yang aman, nyaman dan tertib.

(2) Pernyataan Misi Polrestabes Makassar

- (a) Mewujudkan pemuliaan pelayanan kamtibmas prima untuk meningkatkan kepercayaan publik melalui 9 (Sembilan) program unggulan yaitu kami datang

melayani anda, Makasar beretika, Polisi mabbulo sibatang, penanganan konflik sosial, police care, police goes to school, kampung kamtibmas, pencegahan tipikor dan rekrutment calon polisi (Betah) dan program M4KS;

- (b) Membangun jaringan intelijen yang handal, yang mampu melaksanakan deteksi dini dan deteksi aksi secara cepat dan akurat setiap gejolak sosial yang timbul dalam masyarakat;
- (c) melakukan penegakan hukum secara transparan, tidak diskriminatif, menjunjung tinggi supremasi hukum, HAM, bebas korupsi, bermatabat dan terpercaya;
- (d) meningkatkan kemitraan dengan masyarakat dan mempererat Sinergi Polisional Inter Departemen (Sispindep) dengan Instansi terkait berlandaskan kegotong royongan
- (b) Membangun dan meningkatkan profesionalisme SDM melalui program pendidikan dan latihan.
- (c) Mencegah dan menanggulangi semua bentuk kejahatan konvensional, transnational crime, kejahatan terhadap kekayaan negara dan kejahatan berimplikasi kontinjensi.
- (d) Meniadakan rasa takut dan khawatir (Fear Of Crime) bagi semua anggota masyarakat yang berada dalam wilayah hukum Polrestabes Makassar.
- (e) Membangun budaya bersih bebas dari KKN.
- (f) Menjadikan masyarakat patuh terhadap hukum dan menjadi polisi bagi diri sendiri.
- (g) Menjadikan Polsek sebagai ujung tombak dalam pelayanan terhadap masyarakat

4. Tujuan Jangka Menengah

- 1) Terciptanya Terwujudnya organisasi Polrestabes Makassar yang good governance dan clean government.
- 2) Terwujudnya perubahan mind set dan culture set personel Polrestabes Makassar melalui pelaksanaan program reformasi birokrasi Polri.
- 3) Terwujudnya Polrestabes Makassar yang mampu melindungi segenap lapisan masyarakat serta memberikan rasa aman,

nyaman, tertib dan damai dalam melaksanakan aktifitasnya sehari-hari yang berorientasi pada kearifan lokal Sipakatau, sipakalebbi dan sipakainge;

- 4) Terwujudnya anggota Polrestabes Makassar yang PROMOTER (profesional, moderen, dan Terpercaya)
- 5) Terwujudnya penegakan hukum yang transparan, akuntabel, dan anti KKN yang mampu memberikan perlindungan, pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat serta memenuhi rasa keadilan masyarakat.

5. Sasaran Tahun 2020

a. Program Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya polri.

Sasarannya adalah Menyelenggarakan fungsi manajemen kinerja Polri secara optimal

b. Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur Polri .

Sasarannya adalah terwujudnya untuk pemenuhan kebutuhan dan pemberdayaan materiil, fasilitas dan jasa yang meliputi transportasi komunikasi, peralatan dan gedung.

c. Program Pengawasan dan peningkatan Akuntabilitas Aparatur Polri

Sasarannya adalah terlaksananya penerimaan anggota Polri dilaksanakan secara transparan dengan membangun sistem yang dilengkapi akses transparansi kepada publik

d. Program Peningkatan Pengawasan dan akuntabilitas aparat Polri.

Sasarannya adalah mewujudkan aparat Polri yang Profesional, proposional dan akuntabel sebagai implementasi reformasi Polri khususnya perubahan kultur

e. Program pengembangan Strategis Keamanan dan ketertiban :

Sasaran untuk terciptanya pengembangan startegis keamanan dan ketertiban.

f. Program Pemberdayaan Potensi Keamanan.

Sasaran adalah meningkatnya pemberdayaaan potensi masyarakat.

g. Program pemeliharaan Kamtibmas.

Sasaran adalah terjaminnya kondisi yang dapat memberikan rasa aman, tenteram, kepastian hukum dan bebas rasa takut baik fisik maupun

psikis, terlayannya laporan pengadaan masyarakat dan terciptanya pelayanan dan kemanaan ,masyarakat yang memadai.

h. Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana.

Sasaran :

- 1) Meningkatnya pengungkapan dan penyelesaian perkara kejahatan konvensional, transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara dan kejahatan yang berimplikasi kontijensi.
- 2) Terwujudnya pelaksanaan penegakan hukum rangka tegaknya hukum yang Profesional, Modern dan Terpercaya guna menjamin kepastian hukum terhadap masyarakat di wilayah hukum Polrestabes Makassar dan Jajarannya.

I. Program Pengembangan Hukum Kepolisian

Sasaran :

- 1) Bantuan hukum/saksi/ penterjemah/penyelesaian perkara hukum.
- 2) Terwujudnya pelaksanaan penegakan hukum rangka tegaknya hukum yang Profesional, Modern dan Terpercaya guna menjamin kepastian bantuan hukum terhadap anggota di wilayah hukum Polrestabes Makassar dan Jajarannya.

6. SASARAN PRIORITAS POLRESTABES MAKASSAR TAHUN 2020

Tahapan capaian Renstra Polrestabes Makassar tahun 2015-2019, maka pada tahun 2020 dengan capaian : **“Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima sampai jajaran Polsek terjauh dan sinergi polisional yang produktif dengan didukung Almitsus Polrestabes Makassar berbasis teknologi kepolisian, sumber daya manusia berkualitas, dan kecukupan kesejahteraan personel Polrestabes Makassar guna menghadapi kondisi daya saing bangsa dan keunggulan nasional”**, maka Sasaran Prioritas Polrestabes Makassar tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- 1) Sasaran prioritas polda sulsel tahun 2020: “penegakan hukum dan pemetaan kejahatan siber serta mendorong terciptanya bentuk bentuk produksi konten kreatif, narasi perdamaian dan merawat kebhinekaan republik indonesia di media social;

2) Meningkatkan.....

- 2) Meningkatkan bentuk-bentuk pelayanan kepolisian kepada masyarakat dengan didukung oleh sistem berbasis tik yang mampu mendorong perbaikan kultur organisasi;
- 3) Terwujudnya situasi kondusif pada pemilu 2020 yg demokratis melalui penyelenggaraan pengamanan oleh polri yg professional;
- 4) Penegakan hukum terhadap kejahatan terorisme, narkoba dan korupsi secara profesional dan proporsional;
- 5) Meningkatnya kesejahteraan personil polri;
- 6) Mewujudkan pelayan polri yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme melalui penguatan sistem pengawasan yang efektif dan mendorong penguatan reformasi birokrasi;
- 7) Meningkatkan kapasitas, kapabilitas, kompetensi dan kesejahteraan sdm polri;
- 8) Terpenuhinya Kebutuhan Sarpras Pada Tingkat Polda , Polres/Tabes Dan Polsek Secara Bertahap.

III. Arah Kebijakan dan Strategi

6. Arah Kebijakan dan Strategi Polda Sulsel tahun 2020

TAHAPAN KEBIJAKAN RENSTRA POLDA SULSEL TAHUN 2020	SASARAN PRIORITAS SULSEL 2020	POLDA TAHUN 2020	ARAH KEBIJAKAN POLDA SULSEL TAHUN 2020	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN K/L		PELAKS/ P.JAWAB		
				PROGRAM	KEGIATAN			
1	2	3	4	5	6	7		
<i>Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima sampai jajaran kewilayahan terjauh dan sinergi polisional yang produktif dengan didukung Almatsus Polri berbasis teknologi kepolisian, sumber daya manusia berkualitas, dan kecukupan kesejahteraan personel Polri guna menghadapi kondisi daya saing bangsa dan keunggulan nasional"</i>	1 Sasaran prioritas polda sulsel tahun 2020: "penegakan hukum dan pemetaan kejahatan siber serta mendorong terciptanya bentuk produksi konten kreatif, narasi perdamaian dan merawat kebhinekaan republik indonesia di media sosial"	1	mengoptimalkan pemetaan dan penegakan hukum terhadap kejahatan Siber yang dilakukan oleh jaringan nasional maupun internasional;	11	Program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;	3145	penindakan tindak pidana ekonomi khusus	DIT RESKRIM
		2	meningkatkan sistem keamanan Siber;	1	Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	3071	penyelenggaraan teknologi informasi	BID TIK
		3	penguatan kerja sama dengan <i>civil society</i> untuk merawat kebhinekaan dalam rangka keutuhan NKRI	9	Program pemberdayaan potensi keamanan	5076	pembinaan potensi keamanan	DIT BINMAS

TAHAPAN KEBIJAKAN RENSTRA POLDA SULSEL TAHUN 2020	SASARAN PRIORITAS SULSEL 2020	POLDA TAHUN	ARAH KEBIJAKAN POLDA SULSEL TAHUN 2020	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN K/L		PELAKS/ P.JAWAB
				PROGRAM	KEGIATAN	
1	2		3	4	5	
			4 Meningkatkan produktifitas keterbukaan informasi publik terkait konten kreatif dan narasi perdamaian guna mewujudkan kepercayaan Masyarakat ;	1 Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Polri	5056 pengelolaan informasi dan dokumentasi	BID. HUMAS
			5 meningkatkan kerja sama antar Instansi dan lembaga dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas penanganan kejahatan Siber;	8 Program kerja sama keamanan dan ketertiban	3120 kerja sama keamanan dan ketertiban K/L	DIT. BINMAS
			6 optimalisasi kemitraan melalui kerjasama dengan stakeholder dan upaya mengelola media sosial dalam menekan berita negatif serta mengangkat berita positif;	1 Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Polri	5056 pengelolaan informasi dan dokumentasi	BID. HUMAS
	2		“Meningkatkan bentuk-bentuk pelayanan kepolisian kepada masyarakat dengan didukung oleh sistem berbasis tik yang mampu mendorong perbaikan kultur organisasi”	1 Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Polri	2071 penyelenggaraan teknologi informasi	BID TIK
			2 peningkatan kualitas pelayanan dan sikap petugas	5 Program pendidikan dan latihan aparatur	3100 pembinaan pendidikan dan latihan Polri	SPN BATUA

TAHAPAN KEBIJAKAN RENSTRA POLDA SULSEL TAHUN 2020	SASARAN PRIORITAS SULSEL 2020	POLDA TAHUN	ARAH KEBIJAKAN POLDA SULSEL TAHUN 2020	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN K/L		PELAKS/ P.JAWAB	
				PROGRAM	KEGIATAN		
1	2		3	4	5		
			serta meniadakan pungutan liar pada pelayanan publik;	Polri			
		3	Meningkatkan pelayanan hukum bagi perempuan dan anak sebagai korban kekerasan;	11 Program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;	3142 penindakan tindak pidana umum	RESKRIMUM	
		4	Mengusulkan pembangunan dan renovasi ruang SPKT yang humanis;	2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Polri	5062 pengembangan fasilitas dan konstruksi Polri	ROSAR PRAS	
		5	pengelolaan <i>quick response</i> kepolisian dengan menggunakan standar yang kredibel dan akuntabel;	10 Program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat	3130 pembinaan pelayanan fungsi Sabhara	DIT SABHARA	
		6	menginventarisir dan mengusulkan sarana prasarana pelayanan publik yang berbasis TIK;	2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Polri	3084 Pengembangan peralatan Polri	BID TIK	
	3	“Terwujudnya situasi kondusif pada pemilu 2020 yg demokratis melalui penyelenggaraan pengamanan oleh polri yg profesional”	1	meningkatkan kemampuan deteksi aksi intelijen yang didukung personel, anggaran dan teknologi intelijen yang memadai dalam pelaksanaan Pemilu	7 Program pengembangan strategi keamanan dan ketertiban	3112 analisis keamanan	DIT INTELKAM
			3	Meningkatkan peran Bhabinkamtibmas melalui pemolisian komunitas dalam mencegah	9 Program pemberdayaan potensi keamanan	5076 pembinaan potensi keamanan	DIT BINMAS

TAHAPAN KEBIJAKAN RENSTRA POLDA SULSEL TAHUN 2020	SASARAN PRIORITAS SULSEL 2020	POLDA TAHUN	ARAH KEBIJAKAN POLDA SULSEL TAHUN 2020	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN K/L		PELAKS/ P.JAW AB
				PROGRAM	KEGIATAN	
1	2	3	4	5		
		terjadinya gangguan Kamtibmas pada pelaksanaan tahapan Pemilu 2020;				
		3 terlaksananya pengamanan Pemilu 2020 yang tertib, lancar dan demokratis;	10 Program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat	5077 pembinaan operasional keamanan kepolisian		BIRO OPS
			12 Program penanggulangan Gangguan Keamanan dalam negeri berkadar tinggi	5087 penanggulangan keamanan dalam negeri		SAT BRIMOB
			11 Program Penyelidikan dan Penyidikan	3142 penindakan tindak pidana umum		RESKRIMUM
	4 “Penegakan hukum terhadap kejahatan terorisme, narkoba dan korupsi secara profesional dan proporsional”	1 Meningkatkan penyelesaian kasus-kasus yang menjadi perhatian publik secara profesional, proporsional dan akuntabel;	11 Program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana	3140 penyelenggaraan identifikasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana		DIT RESKRIMUM
				3142 penindakan tindak pidana umum		DIT RESKRIMUM
				3143 penindakan tindak pidana terorism		SAT BRIMOB
				3144 penindakan tindak pidana Narkoba		DIT RESNA RKOBA
				3145 penindakan tindak pidana ekonomi khusus		DIT RESKRIMUMSUS

TAHAPAN KEBIJAKAN RENSTRA POLDA SULSEL TAHUN 2020	SASARAN PRIORITAS SULSEL 2020	POLDA TAHUN	ARAH KEBIJAKAN POLDA SULSEL TAHUN 2020	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN K/L		PELAKS/ P.JAWAB
				PROGRAM	KEGIATAN	
1	2		3	4	5	
					3146 penindakan tindak pidana korupsi 5083 penindakan tindak pidana tertentu	DIT RESKRI MSUS DIT RESKRI MSUS
			2 mengoptimalkan penanganan pungutan liar, pemerasan dan makelar kasus dalam proses penyidikan	11 Program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana	5086 pengawasan penyidikan	DIT RESKRI MUM
			3 peningkatan kompetensi penyidik kejahatan siber, penyidik kejahatan ekonomi, petugas Dokpol dan Labfor melalui sertifikasi ;	5 Program pendidikan dan latihan aparaturnya Polri	3100 penyelenggaraan pendidikan dan latihan Polri	Ro SDM
			4 penanganan kebakaran hutan dan lahan	11 Program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana	5083 penindakan tindak pidana tertentu	DIT RESKRI MUM
			5 menghilangkan rekayasa perkara dan penanganan perkara yang berbelit-belit melalui peningkatan kompetensi	11 Program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana	5086 pengawasan penyidikan	DITRES KRIMU M/SUS

TAHAPAN KEBIJAKAN RENSTRA POLDA SULSEL TAHUN 2020	SASARAN PRIORITAS SULSEL 2020	POLDA TAHUN	ARAH KEBIJAKAN POLDA SULSEL TAHUN 2020	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN K/L		PELAKS/ P.JAWAB
				PROGRAM	KEGIATAN	
1	2		3	4	5	
			pengawas penyidikan			
	5 “meningkatnya kesejahteraan personil polri “.		1 mengusulkan kebutuhan ideal personel dan anggarnya	6 Program pemberdaya an sumber daya manusia	3108 Pembinaan karier personel Polri	BIRO SDM
				1 Program Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	5054 Manajeme n anggaran	BIRO RENA
			2 Mengusulkan pembangunan dan renovasi Polsek secara bertahap;	2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Polri	5062 pengemba ngan fasilitas dan konstruksi Polri	BIRO SARPR AS
	6 “Mewujudkan pelayan polri yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme melalui penguatan sistem pengawasan yang efektif dan mendorong penguatan reformasi birokrasi“.		1 peningkatan dan penuntasan publik komplain;	3 Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Polri.	3091 penyeleng garaan pemeriksa an dan pengawas an	IT WASDA
			2 mengoptimalkan Tim Saber pungli;	3 Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Polri	3091 penyeleng garaan pemeriksa an dan pengawas an	IT WASDA

TAHAPAN KEBIJAKAN RENSTRA POLDA SULSEL TAHUN 2020	SASARAN PRIORITAS SULSEL 2020	POLDA TAHUN	ARAH KEBIJAKAN POLDA SULSEL TAHUN 2020	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN K/L		PELAKS/ P.JAWAB
				PROGRAM	KEGIATAN	
1	2	3	4	5		
		3 meminimalisir Korupsi di internal Polri;	3 Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Polri	3089 Penyelenggaraan pengamanan internal Polri		BIDPRO PAM
		4 melanjutkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Polri;	1 Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Polri	5053 Reformasi Birokrasi Polri		BIRORENA
	7 “meningkatkan kapasitas, kapabilitas, kompetensi dan kesejahteraan sdm polri”.	1 peningkatan kualitas 8 standar pendidikan;	5 Program pendidikan dan latihan aparatur Polri	5070 penyelenggaraan kurikulum pendidikan dan latihan Polri		SPN BATUA
		2 implementasi Analisa Beban Kerja (ABK) pada struktur organisasi Polri;	1 Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Polri	5052 penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Polri		BIRORENA
		3 melaksanakan rekrutmen, seleksi dikbangum dan pembinaan karier sesuai dengan kebutuhan Berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK);	6 Program pemberdayaan sumber daya manusia Polri	3107 pengendalian pegawai Polri		BIRSDM
		4 implementasi jabatan fungsional dan sertifikasi profesi;	5 Program pendidikan dan latihan aparatur Polri	5069 pembinaan pendidikan dan latihan Polri		SPN BATUA

TAHAPAN KEBIJAKAN RENSTRA POLDA SULSEL TAHUN 2020	SASARAN PRIORITAS SULSEL 2020	POLDA TAHUN	ARAH KEBIJAKAN POLDA SULSEL TAHUN 2020	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN K/L		PELAKS/ P.JAWAB
				PROGRAM	KEGIATAN	
1	2	3	4	5		
		5 pemanfaatan program aplikasi e- government melalui e-planning, e-budgeting dan e-rocurement ;	1 Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Polri	3071	penyelenggaraan teknologi informasi	BID TIK
				5054	manajemen anggaran	BIRO RENA
				5055	teknologi komunikasi	BID TIK
		6 peningkatan penanganan layanan kesehatan dan keselamatan kerja bagi anggota polri	1 Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Polri	3072	Pelayanan kesehatan Polri	DOK KES
			2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Polr	5062	pengembangan fasilitas dan konstruksi Polri	BIRO SARPRAS
		7 mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak pada Polri ;	1 Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Polri	5054	manajemen anggaran	BIRO RENA
				3068	pelayanan administrasi keuangan Polri	BID KEU
	8 “Terpenuhinya Kebutuhan Sarpras Pada Tingkat Polda , Polres/Tabes Dan Polsek Secara Bertahap“.	Pengusulan kebutuhan rumah dinas anggota Polri	2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Polr	5062	pengembangan fasilitas dan konstruksi Polri	BIRO SARPRAS

7. Arah Kebijakan dan Strategi Polrestabes Makassar tahun 2020

TAHAPAN KEBIJAKAN RENSTRA POLDA SULSEL TAHUN 2020	SASARAN PRIORITAS POLDA SULSEL TAHUN 2020	ARAH KEBIJAKAN POLDA SULSEL TAHUN 2020	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN K/L		PELAKS/P.JAWAB
			PROGRAM	KEGIATAN	
1	2	3	4	5	
<i>Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima sampai jajaran kewilayahan terjauh dan sinergi polisional yang produktif dengan didukung Almatsus Polri berbasis teknologi kepolisian, sumber daya manusia berkualitas, dan kecukupan kesejahteraan personel Polri guna menghadapi kondisi daya saing bangsa dan keunggulan nasional"</i>	1 Sasaran prioritas polda sulsel tahun 2020: "penegakan hukum dan pemetaan kejahatan siber serta mendorong terciptanya bentuk bentuk produksi konten kreatif, narasi perdamaian dan merawat kebhinekaan republik indonesia di media sosial"	1 mengoptimalkan pemetaan dan penegakan hukum terhadap kejahatan Siber yang dilakukan oleh jaringan nasional maupun internasional;	11 Program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;	3145 penindakan tindak pidana ekonomi khusus	SAT RESKRIM
		2 meningkatkan sistem keamanan Siber;	1 Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	3071 penyelenggaraan teknologi informasi	HUMAS
		3 penguatan kerja sama dengan <i>civil society</i> untuk merawat kebhinekaan dalam rangka keutuhan NKRI	9 Program pemberdayaan potensi keamanan	5076 pembinaan potensi keamanan	SAT BINMAS

TAHAPAN KEBIJAKAN RENSTRA POLDA SULSEL TAHUN 2020	SASARAN PRIORITAS SULSEL 2020	POLDA TAHUN	ARAH KEBIJAKAN POLDA SULSEL TAHUN 2020	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN K/L		PELAKS/ P.JAWAB		
				PROGRAM	KEGIATAN			
1	2	3	4	5				
		4	Meningkatkan produktifitas keterbukaan informasi publik terkait konten kreatif dan narasi perdamaian guna mewujudkan kepercayaan Masyarakat ;	1	Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Polri	5056	pengelolaan informasi dan dokumentasi	HUMAS
		5	meningkatkan kerja sama antar Instansi dan lembaga dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas penanganan kejahatan Siber;	8	Program kerja sama keamanan dan ketertiban	3120	kerja sama keamanan dan ketertiban K/L	SAT BINMAS
		6	optimalisasi kemitraan melalui kerjasama dengan stakeholder dan upaya mengelola media sosial dalam menekan berita negatif serta mengangkat berita positif;	1	Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Polri	5056	pengelolaan informasi dan dokumentasi	HUMAS
	2		“Meningkatkan bentuk-bentuk pelayanan kepolisian kepada masyarakat dengan didukung oleh sistem berbasis tik yang mampu mendorong perbaikan kultur organisasi”	1	Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Polri	2071	penyelenggaraan teknologi informasi	HUMAS
		1	mengusulkan pembangunan dan pengembangan sistem pelaporan masyarakat kepada Polri berbasis TIK;	1	Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Polri	2071	penyelenggaraan teknologi informasi	HUMAS

TAHAPAN KEBIJAKAN RENSTRA POLDA SULSEL TAHUN 2020	SASARAN PRIORITAS POLDA SULSEL 2020	POLDA TAHUN	ARAH KEBIJAKAN POLDA SULSEL TAHUN 2020	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN K/L		PELAKS/ P.JAWAB
				PROGRAM	KEGIATAN	
1	2		3	4	5	
			2 Meningkatkan pelayanan hukum bagi perempuan dan anak sebagai korban kekerasan;	11 Program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana;	3142 penindakan tindak pidana umum	RESKRIM
			4 Mengusulkan pembangunan dan renovasi ruang SPKT yang humanis;	2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Polri	5062 pengembangan fasilitas dan konstruksi Polri	SARPRAS
			5 pengelolaan <i>quick response</i> kepolisian dengan menggunakan standar yang kredibel dan akuntabel;	10 Program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat	3130 pembinaan pelayanan fungsi Sabhara	SAT SABHARA
			6 menginventarisir dan mengusulkan sarana prasarana pelayanan publik yang berbasis TIK;	2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Polri	3084 Pengembangan peralatan Polri	HUMAS
	3 “Terwujudnya situasi kondusif pada pemilu 2020 yg demokratis melalui penyelenggaraan pengamanan oleh polri yg profesional”		1 meningkatkan kemampuan deteksi aksi intelijen yang didukung personel, anggaran dan teknologi intelijen yang memadai dalam pelaksanaan Pemilu	7 Program pengembangan strategi keamanan dan ketertiban	3112 analisis keamanan	SAT INTELKAM
			3 Meningkatkan peran Bhabinkamtibmas melalui pemolisian komunitas dalam mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas pada pelaksanaan tahapan Pemilu	9 Program pemberdayaan potensi keamanan	5076 pembinaan potensi keamanan	SAT BINMAS

TAHAPAN KEBIJAKAN RENSTRA POLDA SULSEL TAHUN 2020	SASARAN PRIORITAS SULSEL 2020	POLDA TAHUN	ARAH KEBIJAKAN POLDA SULSEL TAHUN 2020	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN K/L		PELAKS/ P.JAWAB
				PROGRAM	KEGIATAN	
1	2		3	4	5	
			2020;			
			3 terlaksananya pengamanan Pemilu 2020 yang tertib, lancar dan demokratis;	10 Program pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat	5077 pembinaan operasional keamanan kepolisian	BAG OPS
				12 Program Penyelidikan dan Penyidikan	3142 penindakan tindak pidana umum	RESKRI
	4 “Penegakan hukum terhadap kejahatan terorisme, narkoba dan korupsi secara profesional dan proporsional”		1 Meningkatkan penyelesaian kasus-kasus yang menjadi perhatian publik secara profesional, proporsional dan akuntabel;	11 Program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana	3140 penyelenggaraan identifikasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana 3142 penindakan tindak pidana umum 3143 penindakan tindak pidana terorism 3144 penindakan tindak pidana Narkoba 3145 penindakan tindak pidana ekonomi khusus 3146 penindakan tindak pidana korupsi 5083 penindakan	RESKRIM RESKRIM SAT RESKRIM SAT RESNARKOBA RESKRIM RESKRIM RESKRIM

TAHAPAN KEBIJAKAN RENSTRA POLDA SULSEL TAHUN 2020	SASARAN PRIORITAS SULSEL 2020	POLDA TAHUN	ARAH KEBIJAKAN POLDA SULSEL TAHUN 2020	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN K/L		PELAKS/ P.JAWAB
				PROGRAM	KEGIATAN	
1	2		3	4	5	
					n tindak pidana tertentu	M
			2 mengoptimalkan penanganan pungutan liar, pemerasan dan makelar kasus dalam proses penyidikan	11 Program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana	5086 pengawasan penyidikan	RESKRIM
			3 peningkatan kompetensi penyidik kejahatan siber, penyidik kejahatan ekonomi, petugas Dokpol dan Labfor melalui sertifikasi ;	5 Program pendidikan dan latihan aparaturnya Polri	3100 penyelenggaraan pendidikan dan latihan Polri	BAG SUMDA
			4 penanganan kebakaran hutan dan lahan	11 Program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana	5083 penindakan tindak pidana tertentu	SAT RESKRIM
			5 menghilangkan rekayasa perkara dan penanganan perkara yang berbelit-belit melalui peningkatan kompetensi pengawas penyidikan	11 Program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana	5086 pengawasan penyidikan	SAT RESKRIM
	5 "meningkatnya kesejahteraan personil polri "		1 mengusulkan kebutuhan ideal personel dan anggarannya	6 Program pemberdayaan sumber daya manusia	3108 Pembinaan karier personil Polri	BAG SUMDA

TAHAPAN KEBIJAKAN RENSTRA POLDA SULSEL TAHUN 2020	SASARAN PRIORITAS SULSEL 2020	POLDA TAHUN	ARAH KEBIJAKAN POLDA SULSEL TAHUN 2020	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN K/L		PELAKS/ P.JAWAB
				PROGRAM	KEGIATAN	
1	2		3	4	5	
				1 Program Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	5054 Manajemen anggaran	BAGREN
			2 Mengusulkan pembangunan dan renovasi Polsek secara bertahap;	2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Polri	5062 pengembangan fasilitas dan konstruksi Polri	SARPRAS
	6 “Mewujudkan pelayan polri yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme melalui penguatan sistem pengawasan yang efektif dan mendorong penguatan reformasi birokrasi“.		1 peningkatan dan penuntasan publik complain;	3 Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Polri.	3091 penyelenggaraan pemeriksaan dan pengawasan	SIWAS
			2 mengoptimalkan Tim Saber pungli;	3 Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Polri	3091 penyelenggaraan pemeriksaan dan pengawasan	SIWAS
			3 meminimalisir Korupsi di internal Polri;	3 Program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Polri	3089 Penyelenggaraan pengamanan internal Polri	PROPA M
			4 melanjutkan pelaksanaan Reformasi	1 Program dukungan manajemen dan pelaksanaan	5053 Reformasi Birokrasi Polri	BAGREN

TAHAPAN KEBIJAKAN RENSTRA POLDA SULSEL TAHUN 2020	SASARAN PRIORITAS SULSEL 2020	POLDA TAHUN	ARAH KEBIJAKAN POLDA SULSEL TAHUN 2020	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN K/L		PELAKS/ P.JAWAB
				PROGRAM	KEGIATAN	
1	2		3	4	5	
			Birokrasi Polri;	tugas teknis lainnya Polri		
	7 “meningkatkan kapasitas, kapabilitas, kompetensi dan kesejahteraan sdm polri”.		1 peningkatan kualitas 8 standar pendidikan;	5 Program pendidikan dan latihan aparatur Polri	5070 penyelenggaraan kurikulum pendidikan dan latihan Polri	BAG SUMDUR LAT
			2 implementasi Analisa Beban Kerja (ABK) pada struktur organisasi Polri;	1 Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Polri	5052 penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Polri	BAG REN
			3 melaksanakan rekrutmen, seleksi dikbangum dan pembinaan karier sesuai dengan kebutuhan Berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK);	6 Program pemberdayaan sumber daya manusia Polri	3107 pengendalian pegawai Polri	BAG REN
			4 implementasi jabatan fungsional dan sertifikasi profesi;	5 Program pendidikan dan latihan aparatur Polri	5069 pembinaan pendidikan dan latihan Polri	BAG SUMDA
			5 pemanfaatan program aplikasi e- government melalui e-planning, e-budgeting dan e-rocurement ;	1 Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Polri	3071 penyelenggaraan teknologi informasi	HUMAS DAN SITIPOL

TAHAPAN KEBIJAKAN RENSTRA POLDA SULSEL TAHUN 2020	SASARAN PRIORITAS SULSEL 2020	POLDA TAHUN	ARAH KEBIJAKAN POLDA SULSEL TAHUN 2020	RENCANA KERJA DAN ANGGARAN K/L		PELAKS/ P.JAW AB
				PROGRAM	KEGIATAN	
1	2	3	4	5		
					5054 manajemen anggaran	BAG REN
					5055 teknologi komunikasi	HUMAS DAN SITIPOL
		6 peningkatan penanganan layanan kesehatan dan keselamatan kerja bagi anggota polri	1 Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Polri	3072	Pelayanan kesehatan Polri	URKES
			2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Polr	5062	pengembangan fasilitas dan konstruksi Polri	SARPRAS
		7 mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak pada Polri ;	1 Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Polri	5054	manajemen anggaran	BAG REN
				3068	pelayanan administrasi keuangan Polri	KEU
	8 “Terpenuhinya Kebutuhan Sarpras Pada Tingkat Polda , Polres/Tabes Dan Polsek Secara Bertahap“.	Pengusulan kebutuhan rumah dinas anggota Polri	2 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Polr	5062	pengembangan fasilitas dan konstruksi Polri	SARPRAS

IV

PROGRAM KEGIATAN DAN USULAN PAGU ANGGARAN**9. Program, kegiatan dan sasaran Polrestabes Makassar TA. 2020****a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri**

1). Tujuan dan sasaran.

Tujuannya adalah Menyelenggarakan fungsi manajemen kinerja Polri secara optimal dengan melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, pelayanan internal dan pembayaran gaji yang dilaksanakan secara tepat waktu, akuntabel dan terintegrasi antara Polrestabes dan satuan Polsek jajaran.

Sasarannya adalah Menyelenggarakan fungsi manajemen kinerja Polri secara optimal

2). Kegiatan :

- a) Menyelenggarakan Humas
- b) Penyusunan program, anggaran, dan rencana kerja
- c) Pengadaan makanan / minuman penambah daya tahan tubuh / uang makan PNS
- d) Menyelenggarakan humas
- e) Kegiatan pembinaan
- f) Poliklinik / obat-obatan
- g) Honorarium sai/sakpa/simak/smapi/pengelola keuangan
- h) Pembayaran gaji dan tunjangan
- i) Biaya telepon
- j) Pengadaan peralatan/perlengkapan kantor (polres)
- k) Pengadaan peralatan/perlengkapan kantor (polsek)
- l) Internet

b)Program.....

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri.

1). Tujuan dan sasaran

Tujuannya adalah Mendukung tugas pembinaan dan operasional Polri melalui ketersediaan sarana dan prasarana materil, fasilitas dan jasa baik kualitas maupun kauntitas. Sasarannya adalah terwujudnya untuk pemenuhan kebutuhan dan pemberdayaan materil, fasilitas dan jasa yang meliputi transportasi komunikasi, peralatan dan gedung.

Kegiatan :

- a) Pemeliharaan kendaraan bermotor roda 4/6/10 (polres)
- b) Pemeliharaan kendaraan bermotor roda 2 (polres)
- c) Pemeliharaan kendaraan bermotor roda 2 (polsek)
- d) Pemeliharaan peralatan fungsional (polres)
- e) Pengadaan BMP
- f) Pemeliharaan peralatan kantor (polres)
- g) Pemeliharaan peralatan kantor (polsek)
- h) BMP fungsi Lantas (PNBP)
- i) Pemeliharaan gedung kantor polres
- j) Pemeliharaan alat angkut air
- k) Pemeliharaan kendaraan bermotor roda 4/6/10 (polres)
- l) Pemeliharaan kendaraan bermotor roda 4/6/10 (polsek)
- m) Pemeliharaan kendaraan bermotor roda 2 (polres)
- n) Pemeliharaan kendaraan bermotor roda 2 (polsek)
- o) Pemeliharaan peralatan fungsional (polres)
- p) Biaya Listrik
- q) Biaya Air dan Gas
- r) Pengadaan BMP
- s) Perbaikan peralatan kantor Polres
- t) Perbaikan peralatan kantor polsek
- u) BMP fungsi Polair

c. program.....

c. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Polri.

1. Tujuan dan sasaran

Sasarannya adalah terlaksananya penerimaan anggota Polri dilaksanakan secara transparan dengan membangun sistem yang dilengkapi akses transparansi kepada publik

2. Kegiatannya :

- a) Penegakan hukum anggota/pns polri (siding disiplin/kode etik)
- b) Menyelenggarakan Pengamanan kepolisian
- c) Kegiatan pembinaan provos
- d) Pengadaan bahan makanan dan pemeliharaan tahanan (polres)
- e) Penyelenggaraan pemeriksaan dan pengawasan

d. Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban.

1. Tujuan dan sasaran

Tujuannya untuk mengembangkan langkah-langkah strategi, mulai dari mencegah suatu potensi gangguan keamanan baik kualitas maupun kuantitas, sampai kepada penanggulangan sumber penyebab kejahatan, ketertiban dan konflik di masyarakat dan sektor sosial, politik dan ekonomi sehingga gangguan kamtibmas menurun

2. Kegiatannya :

- a) Honor PNPB
- b) Sewa jaringan telekomunikasi (leased channel)
- c) Pengadaan peralatan / perlengkapan kantor (Polres)
- d) Pengadaan peralatan / perlengkapan kantor (Polsek)
- e) Dukungan Operasional Satker (dukungan pulsa)
- f) Pendataan dan pengawasan pelaku tindak pidana (polres)
- g) Strategi Keamanan dan ketertiban Bidang Politik (Polres dan Polsek)
- h) Strategi Keamanan dan ketertiban Bidang Ekonomi (Polres dan Polsek)
- i) Strategi Keamanan dan ketertiban Bidang Budaya (Polres dan Polsek)
- j).Strategi... ..

j) Strategi Keamanan dan ketertiban Bidang Keamanan Negara (Polres dan Polsek)

f. Program Pemberdayaan Potensi Keamanan :

1). Tujuan dan sasaran

Tujuannya untuk mendekatkan polisi dengan berbagai komunitas masyarakat agar terdorong bekerja sama dengan kepolisian secara proaktif dan saling mengandalkan untuk membantu tugas kepolisian dalam menciptakan keamanan dan ketertiban bersama (Community Policing).

Sasaran adalah meningkatnya pemberdayaan potensi masyarakat.

2). Kegiatan :

- a) Pertemuan Kemitraan Polisi dan Masyarakat (Polres)
- b) Pertemuan Kemitraan Polisi dan Masyarakat (Polsek)
- c) Operasional Bhabinkabmas
- d) Operasi Binmas

g. Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

1. Tujuan dan sasaran

Tujuan adalah Memelihara dan meningkatkan kondisi keamanan dan ketertiban Masyarakat agar mampu melindungi seluruh warga masyarakat Indonesia dalam beraktifitas untuk meningkatkan kualitas hidup yang bebas dari bahaya, ancaman dan gangguan yang dapat menimbulkan cedera, kerugian serta korban akibat gangguan keamanan dimaksud.

Sasaran adalah terjaminnya kondisi yang dapat memberikan rasa aman, tenteram, kepastian hukum dan bebas rasa takut baik fisik maupun psikis, terlayannya laporan pengaduan masyarakat dan terciptanya pelayanan dan kemanaan , masyarakat yang memadai.

2. Kegiatan adalah :

- a) Penyusunan program, anggaran dan rencana kerja
- b) Penyusunan evaluasi Ikip
- c) Rapat rapat koordinasi/kerja/dinas/pimpinan kelompok kerja/konsultasi
- d) Pembinaan sistem dan manajemen

e). Pembinaan.....

- e) Pembinaan Adminitrasi dan pengelolaan Keuangan
- f) Operasional dan pemeliharaan jaringan sistem informasi
- g) Ulp Non Organik / Jaga Fungsi (Polres)
- h) Ulp Non Organik / Jaga Fungsi (Polsek)
- i) Setra Pelayanan Kepolisian
- j) Tindak pidana umum (polres)
- k) Penyusunan perjanjian kinerja
- l) Dukopsnal polres
- m) Dukopsnal polsek
- n) Menyelenggarakan Pengaturan, pengawalan dan Patroli Polsek (PNBP)
- o) Pengendalian Massa
- p) Menyelenggarakan Pengaturan, pengawalan dan Patroli Polres (PNBP)
- q) Bantuan pelayanan masyarakat
- r) Honor PNBP
- s) Biaya Listrik satpas
- t) Biaya Telepon satpas
- u) Pengawasan dan Pembinaan (Honor laka)
- v) Menyelenggarakan Operasi kepolisian
- w) Menyelenggarakan Pengaturan, pengawalan dan Patroli Lantas Polres (PNBP)
- x) Menyelenggarakan Pengaturan, pengawalan dan Patroli Lantas Polsek (PNBP)
- y) Peningkatan kualitas pelayanan Publik
- z) penyelidikan dan penyidikan laka lantas polres
- å) operasi terpusat lilin
- ä) operasi terpusat ketupat

g. Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana.

1). Tujuan dan sasaran

Tujuan adalah Menanggulangi dan Menurunnya Penyelesaian 4 (empat) jenis kejahatan (kejahatan konvensional, kejahatan transnasional, kejahatan yang berimplikasi kontijensi dan kejahatan terhadap kekayaan negara)

Sasarannya adalah

- 1) Meningkatnya pengungkapan dan penyelesaian perkara kejahatan konvensional, transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara dan kejahatan yang berinflikasi kontijensi.

2) Terwujudnya.....

- 2) Terwujudnya pelaksanaan operasi Kepolisian di wilayah Polrestabes Makassar dalam rangka tegaknya hukum guna menjamin kepastian hukum terhadap masyarakat.
- 3) Terwujudnya pelaksanaan operasi Kepolisian di wilayah Polrestabes Makassar dalam rangka tegaknya hukum guna menjamin kepastian hukum terhadap masyarakat.

2) Kegiatan :

- a) penyelenggaraan indentifikasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana
- b) Pengadaan bahan makanan dan perawatan tahanan(Polres)
- c) Pengadaan bahan makanan dan perawatan tahanan(Polsek)
- d) Tindak Pidana Umum (Polres)
- e) Tindak Pidana Umum (Polsek)
- f) Tindak pidana yang melibatkan perempuan dan anak
- g) Saksi ahli dan gelar perkara
- h) Tindak Pidana Narkoba
- i) Tindak Pidana Korupsi

h. Program Pengembangan Hukum Kepolisian.

1). Tujuan dan sasaran

Tujuan adalah Menyelenggarakan pembinaan dan advokasi hukum serta membangun landasan hukum dalam rangka pelaksanaan tugas pokok Polri selaku pelindung, pengayoman dan pelayanan

Sasarannya adalah terbangunnya Postur Polri yang profesional, bermoral, modern dan unggul melalui perubahan mindset dan culture set

2). Kegiatannya

- a) bantuan hukum / saksi / penterjemah / biaya pengacara / penyelesaian perkara hukum

10. Rencana Anggaran Polrestabes Makassar TA. 2020

Alokasi Pagu ideal Polrestabes Makassar T.A 2020 adalah sebesar **Rp.197.419.684.000,-** dengan perincian sebagai berikut :

- a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri sebesar **Rp.155.727.860.000,-**

1. Penerangan Masyarakat

- Menyelenggarakan humas Rp. 95.41.000,-

2. Dukungan Pelayanan internal Perkantoran Polri

- Penyusunan program, anggaran dan rencana kerja Rp 9.800.000,-
- Pengadaan makanan / minuman penambah daya tahan tubuh / uang makan pns Rp 3.686.000,-
- Menyelenggarakan humas Rp 15.000.000,-
- Kegiatan pembinaan Rp 24.736.000,-
- Poliklinik / obat – obatan Rp 44.302.000,-
- Honorarium sai / sakpa / simak / smap / pengelola keuangan Rp 9.600.000,-
- Pembayaran gaji dan tunjangan Rp. 154.671.346.000,-
- Biaya Telepon Rp. 12.696.000,-
- Pengadaan peralatan/perlengkapan kantor polres Rp. 321.300.000,-
- Pengadaan peralatan/perlengkapan kantor Polsek Rp. 416.160.000,-
- Internet Rp 103.824.000,-

- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri sebesar **Rp. 12.681.360.000,-**

1. Dukungan Manajemen dan tehnik sarpras

- Pemeliharaan kendaraan bermotor roda 4/6/10 Polres Rp. 462.000.000,-

Pemeliharaan... ..

- Pemeliharaan kendaraan bermotor roda 2 polres Rp. 93.000.000,-
- Pemeliharaan kendaraan bermotor roda 2 Polsek Rp. 33.000.000,-
- Pemeliharaan Peralatan Fungsional Rp. 15.000.000,-
- Pengadaan BMP Rp. 1.325.400.000,-
- Perbaikan peralatan kantor Polres Rp. 3.410.000,-
- Perbaikan peralatan kantor Polsek Rp. 10.100.000,-
- Bmp fungsi lintas (pnbp) Rp 1.697.949.000,-
- Pemeliharaan gedung kantor Polres Rp. 380.324.000,-.
- Pemeliharaan gedung kantor polsek Rp 164.220.000,-
- Pemeliharaan alat angkut air Rp 24.000.000,-
- Pemeliharaan kendaraan bermotor roda 4/6/10 Polres Rp. 1.170.000.000,-
- Pemeliharaan kendsaraan bermotor roda 4/6/10 polsek Rp 800.000.000,-
- Pemeliharaan kendaraan bermotor roda 2 Polres Rp. 180.600.000,-
- Pemeliharaan kendaraan roda 2 polsek Rp 424.200.000,-
- Pemeliharaan kendaraan Fungsional Rp. 16.138.000,-
- Biaya listrik Rp 1.519.440.000,-
- Biaya air dan gas Rp 270.744.000,-
- Pengadaan BMP Rp. 3.990.600.000,-
- Perbaikan peralatan kantor Polres Rp. 40.275.000,-
- Perbaikan peralatan kantor Polsek Rp. 30.960.000,-
- Bmp fungsi polair Rp 30.000.000,-

c. Program Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur polri sebesar **Rp. 364.450.000,-**

1. Pertanggung jawaban Profesi

- Penegakan hukum anggota/pns polri(sidang disiplin/kode etik) Rp. 23.538.000,-

2. Penyelenggaraan...

2. Penyelenggaraan pengamanan internal Polri

- Menyelenggarakan pengamanan kepolisian Rp. 42.374.000,-

3. Penegakan tata tertib dan disiplin polri

- Kegiatan Pembinaan Provost Rp. 20.183.000,-
- Pengadaan bahan makanan dan pemeliharaan tahanan Polres Rp. 3.150.000,-

4. Penyelenggaraan pemeriksaan dan pengawasan

- Penyelenggaraan pemeriksaan dan pengawasan Rp. 42.000.000,-

d. Program Pengembangan Strategi keamanan dan ketertiban sebesar **Rp. 4.190.509.000,-**

1. Dukungan manajemen dan teknis strategi keamanan dan ketertiban Rp. 95.750.000,-

- Honor PNBK Rp. 58.800.000,-
- Sewa jaringan telekomunikasi (leased channel) Rp 10.800.000,-
- Pengadaan peralatan / perlengkapan kantor polres Rp 20.000.000,-
- Pengadaan peralatan / perlengkapan kantor polsek Rp 19.440.000,-
- Dukungan operasional satker Rp 16.800.000,-

2. Analisis Keamanan Rp. 279.690.000,-

- Pendataan dan pengawasan pelaku tindak pidana polres Rp. 53.670.000,-

3. Penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang politik Rp. 490.466.000,-

- Strategi keamanan dan ketertiban bidang politik Rp. 490.466.000,-

4. Penyelenggaraan...

4. Penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang ekonomi Rp. 490.601.000,-

- Strategi keamanan dan ketertiban bidang ekonomi Rp. 490.601.000,-

5. Penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang sosial budaya Rp. 653.468.000,-

- Strategi keamanan dan ketertiban bidang Sosial budaya Rp. 653.468.000,-

6. Penyelenggaraan strategi keamanan dan ketertiban bidang keamanan negara Rp. 742.453.000,-

- Strategi keamanan dan ketertiban bidang keamanan negara Rp. 742.453.000,-

f. Program Pemberdayaan potensi keamanan sebesar **Rp. 2.429.862.000,-**

1. Pembiayaan potensi Keamanan Rp. 2.429.862.000,-

- Pertemuan kemitraan polisi dan masyarakat polres Rp. 280.706.000,-
- Pertemuan kemitraan polisi dan masyarakat polsek Rp. 228.694.000,-
- Operasional Bhabinkamtibmas Rp. 1.765.950.000,-
- Operasi Binmas Rp. 154.512.000,-

g. Program Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat sebesar **Rp. 12.374.852.000,-**

1. Dukungan manajemen dan teknis pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat Rp. 6.530.538.000,-

- Penyusunan program, anggaran dan rencana kerja Rp 100.000.000,-
- penyusunan evaluasi Ikip Rp 3.500.000,-
- rapat rapat koordinasi/kerja/dinas/pimpinan kelompok kerja/ konsultasi Rp 36.000.000,-
- pembinaan sistem dan manajemen Rp 10.000.000,-
- Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Rp 20.000.000,-

Operasional... ..

- Operasional dan pemeliharaan jaringan sistem informasi Rp 15.000.000,-
 - Ulp non organik / jaga fungsi (polres) Rp 947.940.000,-
 - Ulp non organik / jaga fungsi (polsek) Rp 2.997.540.000,-
 - Sentra pelayanan kepolisian Rp 24.978.000,-
 - Tindak pidana umum (polres) Rp 22.080.000,-
 - Penyusunan perjanjian kinerja Rp 3.500.000,-
 - Dukopsnal polres Rp 1.350.000.000,-
 - Dukopsnal polsek Rp 1.000.000.000,-
- 2. Pembinaan pelayanan fungsi sabhara Rp. 1.831.406.000,-**
- Menyelenggarakan pengaturan,pengaturan dan patroli polsek (pnbp) Rp. 777.546.000,-
 - Pengendalian Massa Rp. 604.800.000,-
 - Menyelenggarakan pengaturan,pengawalan,dan patroli polres Rp. 449.060.000,-
- 3. Penyelenggaraan pengamanan objek vital Rp. 534.720.000,-**
- Bantuan pelayanan masyarakat Rp. 534.720.000,-
- 4. Peningkatan pelayanan keamanan dan keselamatan masyarakat dibidang lalu lintas Rp. 2.984.668.000,-**
- Honor PNBP Rp. 112.440.000,-
 - Biaya Listrik Rp. 48.690.000,-
 - Biaya Telepon RP. 20.060.000,-
 - Pengawasan dan Pembinaan RP. 12.000.000,-
 - Menyelenggarakan Operasi Kepolisian RP. 876.120.000,-
 - Menyelenggarakan pengaturan,pengawalan dan patroli lintas polres Rp. 845.664.000,-
 - Menyelenggarakan pengaturan,pengawalan dan patroli lintas polsek Rp. 573.696.000,-
 - Peningkatan kualitas pelayanan Publik Rp. 70.287.000,-
 - Penyelidikan dan penyidikan laka lintas polres Rp. 425.711.000,-
- 5. Pengendalian Operasi kepolisian Rp. 493.520.000,-**
- Operasi lilin terpusat Rp. 176.080.000,-
 - operasi ketupat terpusat Rp. 317.440.000,-

h). Program.....

- h. Program Penyidikan dan Penyelidikan Tindak pidana sebesar **Rp. 11.436.007.000,-**
1. **Menyelenggarakan Identifikasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Rp. 44.174.000,-**
 - Penyelenggaraan identifikasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Rp. 44.174.000,-
 2. **Penindakan tindak pidana Umum Rp. 7.579.517.000,-**
 - Pengadaan bahan makanan dan perawatan tahanan Polres Rp. 1.086.288.000,-
 - Pengadaan bahan makanan dan perawatan tahanan polsek Rp. 1.051.200.000,-
 - Tindak Pidana Umum Polres Rp. 3.094.139.000,-
 - Tindak pidana Umum Polsek Rp. 1.907.720.000,-
 - tindak pidana yang melibatkan perempuan dan anak Rp 59.648.000,-
 - Saksi ahli dan gelar perkara Rp 45.332.000,-
 3. **Penindakan tindak pidana Narkoba Rp. 2.423.962.000,-**
 - Tindak Pidana Narkoba Rp. 2.423.962.000,-
 4. **Penindakan tindak pidana Korupsi Rp. 1.388.354.000,-**
 - Tindak Pidana Korupsi Rp. 1.388.354.000,-
- i. Program Pengembangan Hukum Kepolisian sebesar **Rp. 22.000.000,-**
1. **Penyusunan dan penyuluhan hukum Rp. 22.000.000,-**
 - Bantuan hukum / saksi / penterjemah / biaya pengacara / penyelesaian perkara hukum Rp 22.000.000,-

V PENUTUP.....

PENUTUP

10. Penutup

Demikian Rencana Kerja Polrestabes Makassar Tahun 2020 disusun untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Tahun 2020

Makassar, Juli 2019

KEPALA KEPOLISIAN RESORT KOTA BESAR MAKASSAR



WAHYU DWI ARIWIBOWO, SIK
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 71040687